

TINJAUAN BUKU

RANAH-RANAH KEBUDAYAAN DI ERA KAPITALISME GLOBAL

Mudji Sutrisno, *Ranah-Ranah Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, 217 hal.

Ditinjau oleh:

Endang Retnowati

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PENDAHULUAN

Banyak ilmuwan telah berbicara tentang implikasi positif dan negatif modernisasi maupun globalisasi. Jurgen Habermas (1984: 236-239) mengemukakan bahwa modernisasi di Barat lebih banyak berlangsung di ranah kerja, tetapi belum berlangsung di ranah dunia kehidupan (*Lebenswelt*). Dunia global cepat terwujud berkat proyek modernisasi yang pada dasarnya dimajukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan (ilmu pasti dan alam) dan teknologi yang begitu cepat. Sebagaimana digambarkan oleh Anthony Giddens (2000: xii) bahwa dunia yang sekarang kita huni merupakan resultan dari empat gugus institusi, yaitu industrialisasi, kapitalisme, militer dan pengawasan. Salah satu implikasinya adalah terdesaknya dunia kehidupan dengan nilai-nilainya oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta produk-produknya yang sangat bermanfaat bagi manusia (misalnya alat kedokteran), dan juga oleh kultur politik, seperti disinggung dalam buku *Ranah-Ranah Kebudayaan* yang ditulis oleh Mudji Sutrisno. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah produknya, kemudian teknologi baru tercipta lagi dari kemajuan ilmu pengetahuan, begitu

seterusnya, sehingga semakin lama semakin banyak produk dihasilkan, dan masyarakat sebagai sasaran perusahaan dalam mencapai untung dan mengakumulasi modal. Produk yang melimpah (mobil mewah, *handphone* canggih, perabotan dapur canggih, dan sebagainya) tentu akan mempermudah hidup manusia sehingga konsumen akan selalu ingin membeli produk baru.

Filsuf Karl Raimund Popper (1979 : 17) menegaskan bahwa perkembangan ilmu berlangsung dari masalah ke masalah. Karena itu, kegiatan ilmiah selalu dimulai dengan masalah. Permasalahan dalam buku *Ranah-Ranah Kebudayaan* yang ditulis oleh Mudji Sutrisno berakar pada pemikiran Habermas mengenai kelangsungan modernisasi yang timpang di dunia Barat. Modernisasi yang berlangsung timpang di Barat mendorong perkembangan sistem ekonomi kapitalis negara industri maju semakin menguasai dunia sehingga membentuk kapitalisme global. Operasionalisasi sistem yang berlangsung secara alamiah memperkuat kekuasaan ekonomi negara industri maju atas negara berkembang seperti Indonesia. Implikasinya adalah terjadinya pereduksian nilai dalam dunia kehidupan ke dalam nilai ekonomi dalam bentuk perhitungan untung rugi. Misalnya, penguasaan pasar bebas dan tambang alam negara berkembang oleh negara industri maju. Tujuan sistem tersebut adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya. Berkaitan dengan penguasaan tambang alam Indonesia oleh pihak asing menunjukkan bahwa nilai moral (fungsi hutan untuk kepentingan umat manusia, yaitu sebagai paru-paru dunia) dan nilai hukum (dalam konstitusi Republik Indonesia disebutkan bahwa kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat) tereduksi ke dalam perhitungan untung rugi secara ekonomi. Hal ini berarti dunia kehidupan telah dikuasai oleh modal. Atas dasar itu, Mudji Sutrisno mengawali penulisan buku ini dengan pertanyaan: mengapa manusia tidak merdeka menentukan dirinya dalam konstruksi budaya tertentu? Apa yang ada dalam relasi manusia dan jaringan kekuasaan yang ada, baik yang tangible (jelas-jelas bisa dikaji) seperti relasi kuasa atasan-bawahan, tuan-budak, atau yang intangible (lebih tidak kasat mata) seperti menentukan makna, the *signifying process*: mengapa ia mengalami dominasi dan subordinasi dalam memberi makna oleh dominasinya kuasa penafsir di tangan orang lain sehingga terjadi hegemoni makna, yaitu makna didominasi dan dikuasai lewat penguasaan kesadaran para “bawahan” oleh penguasa dalam tafsiran makna tunggal yang kebenarannya dan keabsahannya tidak boleh diganggu gugat.

RUANG KEBUDAYAAN

Mudji Sutrisno (2009: 43) mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan potensi dalam setiap orang mulai dari potensi kognitif, potensi estetis, dan potensi religius. Potensi kognitif adalah kemampuan merangkum pengetahuan tentang realitas secara akal budi, potensi estetis adalah kemampuan merasakan kehidupan dari keindahannya, dan potensi religius adalah kemampuan manusia untuk menghayati hidup yang bersumber pada Tuhan. Sementara itu, ruang kebudayaan merupakan tempat mengacu nilai untuk hidup sehari-hari, meliputi inti religi, kepentingan dan nilai, politisasi, jalan setapak peradaban, konflik peradaban, konflik agama, agama wahyu dan agama bumi, asketisme. Tiga yang terakhir merupakan tantangan titik temu oase yang sama dari tiga agama turunan Abraham. Ruang-ruang kebudayaan diperlukan untuk berdialog budaya agar hidup semakin bermartabat, beradab, berharkat dan manusiawi.

Apabila terdapat ruang dialog budaya yang dapat menciptakan suasana hidup seperti yang dimaksudkan oleh Jurgen Habermas (1984: 86-87), yaitu suasana hidup yang manusiawi, diandaikan bahwa umat manusia dapat mempertahankan sebuah ruang yang bebas dari diktator dan pemaksaan dalam komunikasi terbuka dan bebas. Dalam kaitannya dengan ruang kebudayaan, pada era globalisasi ini masih ada kekuatan yang mengancam harkat dan martabat manusia, yaitu penindasan dan kurangnya perhatian pada norma etis (Franz Magnis-Suseno 1995: 187-189). Berkaitan dengan itu, Mudji Sutrisno (2009: 59) mengatakan bahwa apabila setiap orang bersikap terbuka terhadap pendapat pihak lain dan secara jujur berdialog bersama demi perbaikan sistem hidup bersama, dunia ini dapat lebih disejahterakan dan lebih didamaikan karena penyebab pokok keterbukaan adalah diri sendiri yang terjebak ke pengalaman-pengalaman dan informasi yang usang hingga orang lain yang belum berpengalaman dianggap inferior, lebih rendah, dan bodoh.

Kondisi dialog yang dimaksud oleh Mudji Sutrisno di atas adalah kondisi dialog dalam konteks politik. Dalam dialog politik kemungkinan terjadinya dialog tidak sesungguhnya besar karena penguasa menempatkan diri sebagai pihak superior (pihak pemegang “kebenaran”), sedangkan para peserta dialog yang lain sebagai pihak inferior (2009:59). Hubungan antara mereka yang berdialog adalah

sebagai hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai. Hubungan kekuasaan seperti itu juga terjadi dalam kapitalisme. Dalam konteks kapitalisme global, hubungan antara penguasa (superior) dan yang dikuasai (inferior) tercermin dalam hubungan eksploitatif antara negara industri maju dengan negara berkembang atau hubungan eksploitatif antara pengusaha besar dengan penguasa kecil. Negara industri maju yang memiliki dan menguasai teknologi tinggi mampu menghasilkan produk melimpah dan dijual ke negara berkembang. Negara itu mampu pula melakukan perluasan investasi ke negara-negara berkembang yang kalah teknologi guna mengeksploitasi alam, dan sebagainya (Sritua Arief 1998: 139-142, 264-265).

Hubungan eksploitatif tersebut juga telah lama digambarkan oleh filsuf Herbert Marcuse (1898-1979). Menurut Marcuse (1964: xvi) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membentuk sistem teknologi dan membawa masyarakat pada pemenuhan kebutuhan yang tidak rasional karena perusahaan mampu memproduksi barang secara melimpah. Atas dasar itu negara industri maju yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akan mencari sasaran negara berkembang untuk melipatgandakan modal melalui produk-produknya (Sugeng Bahagijo 2006: 225-233)

Berkaitan dengan hal di atas, Mudji Sutrisno (2009: 59-60) menggambarkan bahwa superioritas yang berhadapan dengan inferioritas menjadi pahit karena pengetahuan dan kebijaksanaan dihayati sebagai pemilikan kekuasaan dan akses terhadap ilmu, modal, serta jaringan informasi teknologi. Negara industri maju, sebagai pemilik ilmu, modal, dan teknologi, ingin mendudukkan dirinya sebagai pihak yang menilai masyarakat yang mempraktikkan kehidupan atas dasar tradisi kebijaksanaan setempat (dalam wilayah religi, estetika, dan tradisi) dan tidak mampu menulis dan komputerisasi, sebagai masyarakat primitif. Padahal, di wilayah kebijaksanaan religi, estetis alami, dan tradisi ini mereka memelihara harmoni manusia dengan alam, sesama dan pencipta dalam mitologi-mitologi dan ekspresi simbol-simbol, legenda.

Akibat hubungan antara yang superior (pemilik ilmu, teknologi, dan modal) dengan yang inferior (pihak sasaran) terjadilah penindasan yang digambarkan oleh Mudji Sutrisno (2009: 11-12) sebagai salah satu watak dari kolonialisme modern; daerah koloni (seperti negara berkembang) dijadikan pasar, dipaksa mengonsumsi produk-produk

negara induk (negara industri maju). Dalam kolonialisme modern, sistem ekonomi kapitalis negara industri maju selalu memberi peluang pada negara industri maju untuk membawa keuntungan sebesar-besarnya ke negaranya.

Lebih lanjut, Mudji Sutrisno (2009: 61) menegaskan bahwa kekuasaan uang dan pengetahuan serta politik informasi menguasai mereka yang lemah modal, lemah ilmu dan teknologi (hidup dalam budaya tradisional) dalam bentuk eksploitasi lahan hidup mereka, konsumsi barang-barang dalam pasar global dan bisnis edukasi dan informasi. Ada dua akibat atas hal itu. Pertama, perawatan kemajemukan dalam multikulturalisme menjadi hilang. Kedua, terjadi pemisahan atas dasar pemilikan kekuasaan antara kolonial baru dan mereka yang dikoloni, antara pemilik ilmu yang bisa dibeli dan mereka sebagai bangsa malang yang terus berada di bawah bayang-bayang kolonialisme pikiran, hati, cakrawala atau mereka yang merasa lebih beradab. Oleh karena itu, Mudji Sutrisno mengingatkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme yang dilakukan oleh pejuang dan pendiri Republik Indonesia, seperti Hatta, Soekarno, Sjahrir, Agoes Salim, Tan Malaka, Kartini, sangat mengagumkan. Mereka secara visioner dan serius mengajak bangsa Indonesia untuk merdeka dari mentalitas budak dan mentalitas kuli dengan serius mengubahnya melalui pendidikan agar menjadi individu berharkat.

Akan tetapi, semangat perjuangan yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh di atas tidak menyentuh kesadaran para pejabat yang duduk di lembaga-lembaga pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh Mudji Sutrisno (2009: 61-62), kelompok tertentu yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjebak dalam sikap egois dan tidak visioner. Mereka sulit untuk memerdekakan rekan-rekan sebangsa ketika mereka menjadi kaki tangan penjajah baru atas nama kemajuan, modernitas global, dan peradaban dengan menjual kecerdasannya, kewenangannya, politiknya, dan harga dirinya. Oleh karena itu, muncul dua pertanyaan. Pertama, apakah kita biarkan secara tragis perayaan menjadi bangsa kuli di mana tiap kepala sudah dibebani utang? Kedua, bagaimana nasib berjuta-juta rakyat yang terlantar oleh ulah para pemimpin yang hanya mengejar kepentingan mereka sendiri, korup, tidak memiliki jiwa besar, tidak bervisi, tidak peduli pada pendidikan transformatif dan pemerdakaan bangsa dari ulah kapitalis global yang tetap menjajah dan menguasai?

Fenomena sikap egois dan tidak bervisi bagi kemerdekaan bangsa dari kelompok tertentu tersebut di atas, merupakan salah satu implikasi negatif dari globalisasi dalam bidang ekonomi yang diarahkan oleh rasionalitas instrumental. Sikap tersebut diawali oleh keinginan untuk bergaya hidup hedonistik dari pengaruh iklan. Menurut Franz Magnis-Suseno (2008: 20-21), sikap egois adalah sikap mengabaikan orang lain dengan kebutuhan-kebutuhannya. Sikap itu akan menjadi lebih gawat karena ia akan kehilangan kepedulian sosial, rasa kebersamaan, solidaritas, persahabatan, dan terasing dari dirinya sendiri. Pada akhirnya ia akan kehilangan rasa kebangsaan sehingga negara dinilai sebagai lembaga penyedia fasilitas hidup, tanpa memiliki loyalitas, tanpa patriotisme.

Atas dasar itu kiranya pendidikan sejarah sangatlah penting bagi masa depan bangsa. Sejarah perjuangan Indonesia hingga berdirinya Republik Indonesia memperlihatkan dan memberi pelajaran, semangat bagaimana para pahlawan mempertahankan tanah air dan harga dirinya dari penindasan penjajah. Semangat perjuangan demi bangsa dan negara yang tertanam melalui sejarah sangat berharga bagi generasi muda untuk membangun diri, bangsa, dan tanah air, betapapun dahsyatnya pengaruh negatif globalisasi (Endang Retnowati 2007: 83-84). Dalam hal ini Mudji Sutrisno berpendapat bahwa sekarang sudah harus dimulai suatu wacana pendidikan kepemimpinan, pendidikan kemartabatan “citizenship” dengan kontribusi agama-agama, tradisi lokal untuk isi moralitas, spiritualitas kebaikan dan rasa peduli sesama dan rasa cinta hidup. Hal itu sangat diperlukan agar identitas kita tidak ditentukan oleh kapital, agar kekuasaan global tidak menjadikan kita objek konsumsi penjualan produk kapitalis global, agar kita tidak selalu menjadi bangsa yang kalah. Untuk itu kita membutuhkan figur pemimpin yang memberi keteladanan dalam bidang nilai, misalnya nilai moral. Pendidikan bangsa merupakan kebutuhan utama bangsa agar bangsa memiliki strategi menghadapi kapitalisme global. Apabila strategi bangsa untuk menghadapi sisi negatif sistem ekonomi kapitalis asing, maka pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan akan semakin bertambah (Endang Retnowati 2007: 84). Ada dua contoh untuk hal itu. Pertama, penguasaan tambang-tambang di Indonesia (misalnya tambang emas di Irian Jaya, di Sumbawa) oleh pihak asing. Ketidakadilan tercermin dalam pengelolaan sumber alam yang dalam UUD '45 pasal 33 telah diatur pemanfaatan dan kepemilikannya, yaitu

untuk kepentingan rakyat banyak. Kedua, konversi lahan subur untuk kepentingan industri, pusat perkantoran, real estate hingga bisnis lahan kuburan. Konversi itu berlangsung terus dan pemerintah tidak berusaha membatasi sehingga banyak petani menjadi buruh tani bagi pemilik baru apabila mereka tidak mampu menyewa atau membeli lahan karena harganya sudah mahal (<http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/lokuman/KADIN-98-3024-01082008.pdf>). Di samping itu, petani kecil diposisikan sebagai konsumen benih yang tidak memiliki daya tawar di hadapan perusahaan-perusahaan benih raksasa sejak dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 1992 mengenai Sistem Budidaya Tanaman dan UUNo. 29 Tahun 2000 mengenai Perlindungan Varietas Tanaman sebagai perpanjangan tangan dari perjanjian IPRs (hak atas kekayaan intelektual) bagian dari paket kebijakan WTO (http://www.spi.or.id/wp.content/upload/2008/01/pandangan_petani_2008.pdf).

RUANG REFLEKSI BUDAYA

Pada awal abad ke-19 para filsuf dari Sekolah Frankfurt yang dikenal dengan Teori Kritisnya, antara lain Max Horkheimer (1895-1973), Herbert Marcuse (1898-1979), Theodore Wishegrund (1903-1969), sudah mencermati implikasi negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat di negara industri maju (K. Bertens 2002:194-236). Franz Magnis-Suseno (1995: 165-166), menyatakan bahwa teori kritis hendak menyingkap tabir segala kenyataan yang tak manusiawi (misalnya penindasan negara industri maju terhadap negara berkembang, melegalkan perang demi kelangsungan hidup buruh pabrik senjata dan kelangsungan pabrik senjata), semua baik adanya (maksudnya, dilihat dari permukaan semua kebutuhan terpenuhi, semua produktif, efisien, bermanfaat, pada hal tidak semua produk yang diciptakan secara terus menerus merupakan produk utama manusia, tetapi produk yang diciptakan secara baru oleh perusahaan demi keuntungan perusahaan, misalnya mobil mewah, minuman kaleng beralkohol). Kenyataan seperti itu terjadi karena, menurut Horkheimer, dunia kini adalah dunia modal (Paul Connerton 1976: 218). Dalam dunia modal masyarakat digerakkan oleh modal. Horkheimer berpendapat bahwa masyarakat yang digerakkan oleh modal adalah masyarakat yang digerakkan oleh rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental hanya memiliki nilai instrumental, artinya hanya digunakan sebagai alat, sarana. Rasionalitas ini di masa industri modern bersifat netral.

Artinya, segala sesuatu dianggap sebagai benda sehingga bisa dipakai untuk mencapai tujuan atau kepentingan apa saja. Misalnya, memeralat politik dan agama untuk kepentingan apa saja sehingga melunturkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Sindhunata 1982: 98, 104). Franz Magnis-Suseno (1995: 165-166) mengemukakan bahwa teori kritis mengutik ilmu-ilmu positif, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, teknologi, psikologi; dan juga filsafat. Semua ilmu itu dalam kenyataannya tidak rasional karena mendukung sistem yang irrasional. Sistem itu irrasional karena tidak membahagiakan manusia dan tidak sanggup menciptakan hubungan sosial yang sungguh manusiawi.

Teori kritis lahir pada abad 19. Pada waktu itu aliran positivisme menguasai dunia keilmuan. Positivisme beranggapan bahwa metode ilmu yang berlaku adalah metode yang digunakan oleh ilmu alam. Bahasa yang harus dipakai oleh semua ilmu adalah bahasa yang dipakai oleh ilmu alam. Fakta atau data yang benar adalah fakta atau data yang dapat dilihat dengan pancaindera, dan dapat diukur dengan cara ilmu pasti. Jiwa, Tuhan, dan semacamnya, bukan sebagai objek kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, filsuf dari Sekolah Frankfurt berpendapat bahwa ilmu-ilmu seperti psikologi dan filsafat ketika itu juga irrasional dan mendukung sistem yang irrasional. Sementara itu, perusahaan yang menggunakan jasa perkembangan ilmu dan teknologi hanya mempertimbangkan keuntungan dari produk-produk yang dihasilkan. Misalnya, perusahaan senjata selalu beroperasi agar perusahaan tetap memperoleh untung dari penjualan produk yang semakin canggih, perusahaan mobil selalu menciptakan mobil dengan asesoris yang beragam agar konsumen tertarik. Padahal, sebenarnya asesoris itu bukan kebutuhan utama. Dalam hal ini manusia dinilai sebagai benda, sebagai alat untuk mengakumulasi modal oleh perusahaan. Maka, sistem (maksudnya sistem ekonomi kapitalis negara industri maju) yang beroperasi disebut irrasional dan ilmu yang berkembang dan mendukung sistem ketika itu disebut irrasional.

Menurut Max Horkheimer (Paul Connerto 1976: 218), sistem yang irrasional tercermin dalam bentuk kebudayaan yang didukung oleh perang dan penindasan sebagai hasil karya manusia atas kehendak taksadar. Misalnya, sistem mendorong buruh pabrik memproduksi senjata untuk mendukung perang Amerika di Vietnam atau Irak. Sementara itu, sistem yang rasional tercermin dalam bentuk ekonomi dan kebudayaan sebagai karya manusia sadar. Misalnya, sistem mendorong

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran, melalui penelitian yang hasilnya akan digunakan oleh perusahaan demi kepentingan umat manusia.

Sisi negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin dalam aliran positivisme terlihat dalam hubungan sosial. Hubungan sosial yang terbangun menyerupai hubungan antara yang menguasai (manusia sebagai subjek) dengan yang dikuasai, manusia sebagai objek (Franz Magnis-Suseno 1995: 171). Dalam hubungan sosial seperti itu tidak terjadi dialog dengan sungguh-sungguh, pelaku melakukan tindakan strategis. Tindakan strategis berorientasi pada sukses pribadi (Jurgen Habermas 1984: 285-289). Contoh tindakan strategis dalam konteks ini adalah tindakan pelaku bisnis dalam menyiasati persaingan untuk meraih keuntungan besar. Realitas seperti itu dapat dilihat pada masa Orde Baru era 1980-1990-an 70% pengusaha Indonesia adalah para politisi dan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Mereka berbisnis dengan dukungan politik dan fasilitas birokrasi (Rauf 1998: 49). Kondisi itu membentuk hubungan antara penguasa dengan rakyat sebagai hubungan antara yang menguasai dengan yang dikuasai. Misalnya, tanah rakyat yang masih produktif digusur dengan alasan kepentingan umum. Padahal, demi kepentingan bisnis kelompok tertentu (Arief 1998: 232).

Realitas yang terbentuk dari hubungan sosial yang bersifat strategis seperti tersebut akan melunturkan hubungan sosial yang didasari oleh nilai-nilai (nilai moral, nilai hukum) karena bentuk hubungan sosial akan direduksi menjadi bentuk hubungan ekonomi di mana untung rugi secara ekonomi menjadi dasar/orientasinya.

Sistem ekonomi kapitalis asing yang digerakkan oleh rasionalitas instrumental lama kelamaan akan menggulung dunia kehidupan yang berisi nilai-nilai seperti nilai moral dan nilai hukum karena tujuan utamanya hanya mencapai untung sebanyak mungkin demi akumulasi modal. Seperti dikemukakan oleh Ngugi Wa Thiong'o bahwa perilaku dunia Barat, khususnya Amerika seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat dunia. Mereka berusaha untuk menghancurkan tradisi dan bahasa pribumi sehingga bangsa-bangsa tersebut kebingungan dalam upaya mencari identitas budaya nasionalnya. Ia meyakini bahwa budaya asing yang berkuasa di berbagai bangsa, yang dahulu dipaksakan lewat imperialisme, kini dilakukan dalam

bentuk yang lebih luas dengan nama globalisasi (<http://itha.wordpress.com/2007/09/12/globalisasi-dan-kebudayaan/>). Atas dasar itu, realitas sosial yang terancam oleh penguasaan rasionalitas instrumental dalam bidang ekonomi memerlukan pendekatan kebudayaan.

Menurut Mudji Sutrisno (2009: 25), pendekatan kebudayaan adalah pendekatan yang melihat realitas masyarakat dari sudut pandang mentalitas, nilai yang menjadi orientasi dan merekatkan bangsa majemuk yang diwujudkan dalam sikap saling hormat-menghormati hak individu, bersikap toleran pada perbedaan etnik, agama, dan golongan. Sikap-sikap itu merupakan jalan panjang peradaban, sebagai humanisasi kebudayaan, agar kemiskinan dan kebodohan dikurangi. Sementara itu, jalan yang harus dilalui adalah jalan pendidikan agar bangsa memiliki tempat untuk berguru. Dalam kaitan dengan ini, menurut sejarah, guru sejati bangsa berjumlah sedikit seperti generasi Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Driyarkara. Setelah itu, banyak guru sebagai koruptor yang menampilkan ketidakteladanan. Bung Karno memang pernah dinilai bersalah dalam bidang politik karena kebijakannya mengenai praktik demokrasi dinilai tidak tepat sehingga akhirnya membawa Bung Karno pada berakhirnya masa jabatannya (Miriam Budiardjo 2003: 71-720). Menurut Franz Magnis-Suseno (2007:183, 217-218), Soekarno memang memiliki kekurangan dan kebijakan yang kurang tepat. Semua itu tidak berarti dibandingkan dengan arti besar beliau bagi bangsa Indonesia. Beliau seorang yang jujur, tidak korup, tidak memikirkan kepentingannya sendiri, pecinta bangsa Indonesia yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk rakyat Indonesia yang dicintai. Bung Karno seorang yang membanggakan. Sementara itu, pada masa Orde Baru elite intelektual dan keagamaan, para penulis di media, para panutan dan guru bangsa cenderung terseret oleh emosi-emosi politik dan primordialistik daripada menyuarakan jeritan rakyat. Masalah Indonesia yang paling serius pada awal abad 21 adalah pengkhianatan elite terhadap rakyatnya.

Perilaku buruk, seperti para koruptor, yang tidak memberi keteladanan merupakan masalah bangsa yang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Penyelesaian masalah Indonesia semestinya dapat didukung oleh mereka yang berperan penting dalam masyarakat seperti Para Guru Bangsa. Mudji Sutrisno (2009: 26) menyebutkan bahwa peradaban memerlukan cendekiawan yang terdiri atas empat tipe, yaitu

mereka yang menyebarkan ide-ide perubahan, cendekiawan organik dengan laboratorium penelitian, cendekiawan kritis, dan cendekiawan transformatif. Penyumbang bangsa untuk transformasi (perubahan sikap mental dan pembaruan) menjadi ukuran peranannya dalam masyarakat.

ORIENTASI DASAR BAGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Menurut Paul Ricoeur (1991: 249), setiap ideologi berkaitan dengan pendirian kelompok sosial. Artinya, ideologi selalu mengingatkan akan peristiwa pendirian kelompok sosial, untuk selanjutnya diulang dan diaktualisasikan; kelompok sosial tersebut memiliki nilai-nilai atau keyakinan. Atas dasar itu dapat dipahami bahwa ideologi Pancasila dalam bentuk abstrak universal (terdiri dari lima sila) merepresentasikan apa yang dikemukakan oleh Ricoeur tentang ideologi tersebut dan Pancasila diciptakan sebagai ideologi negara. Oleh karena Pancasila sebagai ideologi negara, semua urusan berkaitan dengan kehidupan kenegaraan didasarkan pada ideologi Pancasila.

Berkaitan dengan peran atau fungsi Pancasila sebagai ideologi tersebut, Mudji Sutrisno (2009: 70) mengemukakan bahwa sila-sila Pancasila merupakan acuan dasar, sumber mata air, pengembangan proses-proses kebudayaan bangsa Indonesia dan dioperasionalkan dalam bentuk aturan hukum untuk ranah nyata kebudayaan (tangible) dan dalam bentuk bahasa dialog-dialog peradabannya untuk ranah yang tidak bisa menggunakan bahasa hukum karena merupakan wilayah ruh atau intangible dari kebudayaan.

Pancasila sebagai ideologi juga sangat bermanfaat bagi referensi dalam menafsir keindonesiaan. Peluang menafsirkan sangat terbuka bagi seseorang (Paul Ricoeur 1991: 249-151). Artinya, ideologi membuka peluang untuk ditafsirkan atau diinterpretasikan. Oleh karena itu, ideologi Pancasila dalam bentuknya yang abstrak universal (terdiri dari lima sila) memberi peluang untuk ditafsirkan dan dirumuskan kembali. Pada masa Orde Baru Pancasila sebagai ideologi dalam bentuk abstrak universal dirumuskan ke dalam bentuk rumusan sederhana, berupa butir-butir Pancasila yang berjumlah 36 (Endang Retnowati 2006: 79-80).

Mudji Sutrisno (2009: 76-82) berpendapat bahwa penafsiran keindonesiaan telah dilakukan secara politis, ekonomis, dan kebudayaan.

Pengalaman sejarah selama setengah abad lebih sejak Indonesia merdeka, secara politis menunjukkan bahwa menafsirkan keindonesiaan secara politis hanya melahirkan perpecahan dan peretakan keindonesiaan. Tafsiran kuasa melahirkan hubungan antagonis dan ketergantungan antara penguasa dengan rakyat. Keindonesiaan yang awalnya tulus membangun jatuh ke dalam demokrasi dipimpin Soekarno atau demokrasi paternalistik Soeharto sehingga kekuasaan yang terpusat dan korupsi meretakkan Indonesia dalam jurang ketidakadilan pusat dan daerah, lokal dan nasional.

Lebih lanjut, Mudji Sutrisno (2009: 76-77) mengemukakan bahwa tafsiran keindonesiaan secara ekonomis dengan pertumbuhan dan biaya utang telah melahirkan jurang dalam antara yang terus bertambah kaya dengan yang terus miskin dan tergesur. Menafsirkan keindonesiaan secara ekonomis memasukkan sekaligus globalisasi modal yang membuat banyak anak bangsa menjadi tenaga kerja yang terombang-ambing oleh pemilik kuasa modal.

Menafsirkan keindonesiaan secara kultural, menurut Mudji Sutrisno (2009: 82), sebenarnya menghadapkan kita pada guru-guru kebudayaan yang akan kita pilih. Pertama, guru yang mengajari bahwa sebagian besar hidup ini hasil asketisme intelektual, misalnya para Founding Father Republik Indonesia. Kedua, guru panggung *performance* MTV, dunia maya yang diproduksi oleh para penguasa pencitraan. Ketiga, yang mengajari bahwa pemilikan adalah harkat manusia. Keempat, guru kekuasaan di mana wewenang adalah kekuasaan. Kelima, guru posmo yang membongkar, tetapi tidak merekonstruksi.

Berhadapan dengan guru-guru tersebut, tentu kita harus memilih dan menentukan guru mana yang patut diteladani dan dikritisi demi kemajuan bangsa dan keselamatan bangsa. Figur guru dapat ditentukan melalui tindakan (misalnya dari sudut nilai moral) dan karya-karyanya. Di masa Orde Baru kita telah membaca berita-berita di media massa bahwa figur-figur yang seharusnya menjadi teladan justru terpuruk dalam sikap dan tindakan yang kurang patut seperti melanggar UUD '45 atau melakukan korupsi. Menurut Endang Retnowati, mereka telah dikondisikan oleh sikap, pola perilaku serupa sebelumnya sehingga tindakan buruk itu sudah menjadi kebiasaan buruk bangsa (Masyarakat Indonesia 2009: 142-144).

Jadi, mengacu pada Habermas (1984: 238), maksud pembangunan kebudayaan adalah pembangunan bidang kehidupan yang meliputi bidang moral, hukum, dan estetika karena bidang kehidupan telah terdesak oleh laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orientasi dasarnya adalah ketiga bidang kehidupan tersebut. Sumber moral adalah tradisi atau adat, agama, dan ideologi (Franz Magnis-Suseno 1993: 3). Sumber hukum Indonesia adalah UUD'45. Sementara itu, dalam hal estetika, merawat seni tradisional dapat berarti memelihara nilai-nilai tradisi (yang bersumber pada agama atau adat, atau keduanya) yang terkandung dalam seni tersebut.

MEMBACA KEBUDAYAAN

Mudji Sutrisno (2009: 91) menegaskan bahwa bagi Gadamer membaca merupakan kerja menafsir. Penafsir harus mampu menangkap makna awal pengarang dan harus cermat tentang tiga tempat beradanya makna, yakni (i), makna yang dituliskan oleh pengarang dari peristiwa/pegalaman hidup yang dituangkan dalam huruf; (ii), ia harus membandingkan dengan teks-teks di sekitar tema serupa yang biasanya disebut penafsir teks; (iii), kesediaan penafsir untuk terbuka dan membuka cakrawala mata baca dengan cakrawala makna teks. Ada dua cara membaca teks. Pertama, membaca secara intrinsik, yaitu membaca dari dalam proses teks itu ditulis. Misalnya, makna teks sastra didekati dan dibaca lewat kode sastra: tema, penokohan, dan alur kisah dalam novel sastra. Kedua, membaca secara ekstrinsik, yaitu menafsir sastra melalui ilmu-ilmu di luar teks sastra seperti sosiologi sastra, mendekati sastra dari ilmu sosiologi.

Lebih lanjut, Mudji Sutrisno (2009: 91) mengemukakan bahwa konsekuensi logis dari pembacaan sastra seperti di atas adalah kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu, (i) menafsirkan menurut makna penulis teks yang sesuai dengan kualitas nilainya; (ii), membaca dan membongkar sisi kepentingan penulisan teks dari disiplin ilmu dari luar teks, misalnya kepentingan ideologis teks sejarah yang ditulis oleh penguasa adalah sebagai alat pembenaran keberadaan rezim penguasa itu.

Mudji Sutrisno (2009: 94) berpendapat bahwa ada keterbatasan bahasa sebagai sistem tanda untuk merumuskan peristiwa-peristiwa atau

pengalaman kehidupan itu. Pada masa sekarang dalam kajian budaya, makna teks diperluas untuk mengartikan tindakan sosial dan karya warga atau masyarakat, untuk menghayati kehidupannya, baik secara sosial, politis, estetis religius.

C.A. van Peursen (1980: 235-247) mengemukakan bahwa bahasa sebagai sistem tanda memiliki hukum-hukum yang baku dan objektif, seperti dalam kamus. Sementara itu, kehidupan merupakan realitas sosial yang sangat luas, di dalamnya terjalin hubungan sosial, nilai-nilai budaya dikomunikasikan lewat karya seni oleh penciptanya, dan sebagainya. Setiap orang akan melukiskan pikiran atau pengalaman sesuai dengan latar belakang pandangan dunia atau ilmu yang dimilikinya dan setiap orang dengan latar belakang pandangan dunia atau ilmu yang berbeda akan memaknai sebuah teks (misalnya karya seni) secara berbeda, sehingga teks dapat ditafsirkan secara terus-menerus, tidak pernah lepas dari subjek (manusia) yang menafsirkan karena kondisi kesadaran manusia selalu berubah bersama bertambahnya pengetahuan.

Menurut Mudji Sutrisno (2009: 84-85), pemahaman kebudayaan dapat dilakukan melalui beberapa proses. Tahap pertama, kebudayaan diungkapkan dalam bahasa, meliputi sintaksis, tatabahasa, makna teks awal. Tahap ini menuntut pembacaan budaya dari bahasa lisan, tulis, serta simbolis/semiotis. Tahap kedua, kebudayaan diungkapkan, ditradisikan oleh komunitas budaya melalui peribahasa, tradisi dongeng, mitos, ritus, simbol, adat kebiasaan, bahasa tanda. Kebudayaan ini tidak hanya dipahami secara rasional, tetapi juga secara intuitif. Tahap ketiga, kebudayaan dilembagakan dan dimantapkan dalam sistem organisasi masyarakat oleh komunitas budaya yang meliputi pengaturan hidup bersama agar saling menghormati dan damai.

Taha keempat, tahap kebudayaan dalam tari, musik, sastra (tulis dan lisan), legenda, epos (kisah pahlawan dan ideal hidup yang baik). Pembacaan kebudayaan butuh pemahaman estetis, religius dan etis atau intuisi keindahan dari kehidupan, dari tetarian dan nyanyi, serta empati religius etis terhadap tingkah laku dan tindakan yang dipilih komunitas itu.

Tahap kelima, kebudayaan yang tersirat dalam norma, aturan tingkah laku, pantangan serta tabu yang mengatur hubungan bersama anggotanya, dan ritual kematian, serta rites of ilfe passage (lingkar

kehidupan). Kebudayaan di sini dipahami melalui dialog antarsesama anggota masyarakat (misalnya guru dengan murid, orang tua dengan anak) secara terbuka demi kepentingan bersama.

MENENTUKAN UKURAN KEBENARAN

Memahami atau menginterpretasi merupakan salah satu metode untuk menemukan kebenaran. Ukuran kebenaran merupakan pokok yang dibicarakan dalam epistemologi. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dan menyeluruh tentang pengetahuan. Salah satu permasalahan yang diperhatikan adalah mengenai bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan diuji kebenaran (Sudarminta 2002: 18). Ada beberapa kriteria kebenaran yang berlaku dalam kerja ilmu pengetahuan. Mudji Sutrisno (2009: 15-16) menegaskan perihal ukuran kebenaran ketika subjek mengalami dikotomi dengan objek karena subjek (peneliti/ilmuwan) berhadapan dengan objek penelitian yang berupa manusia, yaitu ukuran subyektif dan ukuran objektif. Ukuran subjektif berdasar selera, pendapat pribadi subjektif masing-masing, tanpa perbandingan dan wacana bersama orang lain. Subjektivitas selera terungkap pada keragaman selera makanan, pada rasa senang atau tidak senang. Wilayahnya adalah rasa. Sementara itu, ukuran objektif berdasar cara yang dapat dibenarkan orang lain, dan bersama orang lain dalam sebuah wacana intersubjektif hingga mencapai konsensus mengenai apa yang objektif benar.

Menurut Mudji Sutrisno (2009: 17-20), ada beberapa kriteria kebenaran. Pertama, kesesuaian antara apa yang diketahui oleh orang (informasi) dengan kenyataan. Misalnya, candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Pernyataan ini harus diuji kebenarannya dengan cara melihat fakta geografi. Menurut Milton D.Hunnex (1986: 7), jenis kebenaran ini adalah sebagai kebenaran korespondensi. Mereka yang mendukung kebenaran ini biasanya sangat menghargai pengamatan dan pemeriksaan empiris (aposteriori). Anggapan itu sudah muncul sejak masa Yunani dalam pandangan Heraklitos, Aristoteles (C.Verhaak dan Haryono Imam 1991: 122-123). Kriteria kebenaran ini berlaku bagi ilmu-ilmu empiris seperti ilmu hayat, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya.

Kriteria kebenaran kedua adalah “utilitarian”. Artinya, sesuatu dipandang benar apabila bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Maksud Mudji Sutrisno dengan teori kebenaran utilitarian tidak berbeda dengan teori kebenaran pragmatis. Kebenaran menurut teori pragmatis ditentukan atas dasar manfaat atau penerapan nilai (Milton D.Hunnex 1986: 7). Misalnya, benar dalam ilmu bedah adalah aman, benar dalam ilmu teknik (misalnya konstruksi bangunan) adalah nilai ekonomis.

Ketiga, ukuran kebenaran dalam masyarakat pluralis di mana ruang subjek-objek dewasa yang akal budinya kritis rasional dan nuraninya jernih berupa ukuran kebenaran konsensus yang terkonstruksi dengan tata kalimat bahasa, berlangsung dalam dialog secara terus-menerus, dan kerendahan hati. Selanjutnya, apabila kebenaran konsensus dibahasakan hukum dan diukur dengan adil, kebenaran itu menjadi kebenaran legal.

Teori kebenaran konsensus yang dimaksud oleh Mudji Sutrisno di atas adalah teori kebenaran yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas (1984: 307-308) dalam konteks Etika Diskursus. Maksud kebenaran dalam teori ini adalah tercapainya konsensus rasional yang menuntut beberapa syarat, yaitu pembicara mengungkapkan pernyataan dengan bahasa benar, menepati norma komunikasi sehingga terjadi saling memahami antara pembicara dan pendengar, jujur/tulus mengungkapkan diri (mengekspresikan maksud, perasaan, keyakinan, keinginan, dan sebagainya) sehingga pendengar akan memberikan kepercayaan pada apa yang dikatakan).

Kriteria kebenaran yang disebutkan oleh Mudji Sutrisno di atas perlu dilengkapi dengan model ukuran kebenaran yang lain, yaitu kebenaran koherensi (Milton D.Hunnex 1986: 7) karena pembedaan ilmu juga meliputi ilmu nonempiris (ilmu deduktif, seperti matematika, logika), dan ilmu empiris-pragmatis (ilmu bedah, ilmu teknik).

Menurut teori koherensi, kebenaran dapat diterima asalkan terdapat harmoni internal proposisi-proposisi dalam satu sistem (Milton D.Hunnex 1986: 7). Misalnya, lingkaran itu bulat. Kebenaran itu ada di dalam sistem, tidak membutuhkan verifikasi. Kriteria kebenaran ini berlaku bagi ilmu nonempiris (deduktif formal) seperti matematika dan logika.

DIMENSI KULTURAL PENGETAHUAN

Menurut Mudji Sutrisno (2009: 22), dimensi kultural pengetahuan sering dibahasakan sebagai nilai, yaitu apa yang dihargai, dipandang bermakna untuk humanisasi. Nilai yang dipandang bermakna untuk humanisasi adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan adalah mencerahkan, mencerdaskan, serta memerdekakan manusia manakala ia mencarinya dan mengolahnya. Berkaitan dengan hal itu, para *Founding Fathers*, antara lain Bung Hatta, menaruh dimensi kultural pengetahuan, disebut nilai pengetahuan (seperti mencerdaskan, memerdekakan manusia), untuk humanisasi dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjelasan tentang UUD '45 menyebutkan bahwa pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil merupakan prinsip dasar moral. Prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang yang bersangkutan (Franz Magnis-Suseno 1995: 132). Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara keadilan disebut dengan istilah keadilan sosial. Para *Founding Fathers* meletakkan ide keadilan sosial dalam urutan sila kelima dari Pancasila.

Sementara itu, maksud kata beradab dalam kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab di atas adalah manusiawi. Kemanusiaan dalam sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah kemanusiaan universal. Karena itu siapa pun, termasuk negara dan pemerintah, dituntut untuk memperlakukan warga negara secara adil dan manusiawi. Pemahaman para *Founding Fathers* Republik Indonesia akan hak asasi dituangkan dalam pembukaan UUD '45, terutama dalam alinea pertama, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa; maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; dan dalam alinea keempat yang antara lain disebutkan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemuatan itu juga mencerminkan bahwa para *Founding Fathers* Republik Indonesia menginginkan agar hak asasi bangsa Indonesia dihormati dan dilindungi

oleh negara (Endang Retnowati 2009:14)

Salah satu nilai pengetahuan untuk humanisasi yang disebutkan di atas adalah “mencerdaskan”. Di sini “mencerdaskan” berarti sebagai jalan peradaban. Mudji Sutrisno (2009: 23) berpendapat bahwa jalan peradaban memiliki dua ujung tombak. Pertama, pencerdasan kehidupan bangsa merupakan sikap kultural yang langsung relevan ketika berhadapan dengan pemakaian pengetahuan masa kini untuk kepentingan kapitalisme global di mana pengetahuan lokal, tradisi religius diambil untuk komoditisasi. Di sini pengetahuan tidak dipakai untuk kepentingan pencerahan dan kemerdekaan maupun pencerdasan, tetapi untuk ekonomisasi perdagangan pengetahuan. Misalnya, biaya masuk sekolah mulai dari TK sampai SMU sebanyak dua hingga tiga juta rupiah. Pertanyaannya, siapa yang masih bisa sekolah bila warga kita banyak yang tidak mampu? Dengan demikian, telah terjadi de-humanisasi.

Dalam kenyataannya memang terdapat sekolah-sekolah yang didirikan dengan biaya sekolah murah atau gratis bagi yang tidak mampu. Akan tetapi, jumlahnya sangat sedikit, tidak seimbang dengan jumlah warga yang tidak mampu secara ekonomi dan membutuhkan pendidikan (<http://techno.okezone.com/read/2010/05/24/55/335946/kaskus-angel-of-change-bagi-anak-putus-sekolah>). Berkaitan dengan ini pemerintah juga belum mampu mengatasi secara tuntas. Apabila mengacu pada UUD'45, pasal 31 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang, undang-undang pendidikan seharusnya mampu mengatasi persoalan tersebut.

Kedua, dalam konteks kepentingan politik, ketika hubungan sosial yang ditentukan oleh hubungan kekuasaan antara tuan dan hamba, penguasa dan yang dikuasai, teks pencerdasan kehidupan bangsa menggugat pencerahan dan kemerdekaan manusia sebagai humanisasi pendidikan. Akan tetapi, aturan dan hukum sebagai produk politis justru membagi bangsa ini menjadi yang kuat dan yang lemah, yang berkuasa dan yang dikuasai (2009: 23-24). Hal ini terlihat pada masa Orde Baru, bahwa kepentingan kekuasaan dan ekonomi individu dan kelompok yang dimantapkan dan dipelihara oleh ideologi mendapat porsi lebih besar dalam pembangunan nasional (Endang Retnowati 2006: 161). Pembangunan gedung-gedung sekolah yang begitu banyak hanya

sebagai alat untuk menutupi realitas sebenarnya.

Pada era kapitalisme global, kedua hal tersebut sulit diatasi karena gerak, sifat atau jiwa kapitalisme hampir merasuki seluruh sendi kehidupan sehingga berpotensi mendesak nilai-nilai tradisi yang berkembang dan diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal itu terjadi melalui pengaruh psikologis yang ditanamkan oleh perusahaan (M.Sastrapratedja 1982: 124-125). Tujuan kapitalisme adalah mencari untung sebanyak-banyaknya. Perusahaan negara-negara industri maju mencari sasaran bagi penjualan produk-produknya. Negara berkembang menjadi sasaran penjualan produk tersebut. Produk-produk perusahaan, seperti mesin cuci, mobil mewah, makanan dan minuman instant impor yang tersedia di supermarket, alat kecantikan wanita, dan sarana hidup lain, memudahkan kita bekerja dan memberi rasa nikmat kepada kita. Itu memancing orang untuk terus membeli sehingga berpotensi membentuk sikap egois (mengabaikan orang lain dengan kebutuhan-kebutuhannya), kurang memiliki nilai solidaritas (Franz Magnis-Suseno 2008: 21-22).

Oleh karena itu, Mudji Sutrisno (2009: 24) berpendapat bahwa tantangan teks pendidikan pencerdasan kehidupan bangsa secara tegas mengajak untuk bersikap kultural pada masalah bisnis pendidikan, kapitalisasi sekolah, dan politisasi pendidikan. Maka, menurut Mudji Sutrisno ada beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, mengembalikan teks pendidikan pada konteks kulturalisasi atau nilai budayanya, yaitu pencerahan dan pemerdakaan dari kebodohan, keterbelakangan, dari situasi tidak manusiawi, menuju kondisi yang manusiawi. Kedua, menjadikan teks pendidikan sebagai bahan reorientasi ketika terjadi disorientasi teks pendidikan pada uang, kapital, dan materi dan membawa teks pendidikan ke dimensi nilai kultural. Ketiga, teks pencerdasan kehidupan bangsa semestinya menjadi orientasi peradaban, kesetaraan politis sesama warga ketika kecenderungannya kekerasan demi orientasi kuasa dan politisasi semakin panas merajalela.

KESADARAN KRITIS

Kesadaran kritis sangat diperlukan bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan dan peradaban. Mudji Sutrisno (2009:104) mengemukakan bahwa kesadaran kritis berasal dari kesadaran manusia yang membaca fakta dan menerima informasi, dan berbekal pendidikan kesadaran lalu

mengamini, menggugat, mengiyakan dan menanyakannya.

Akan tetapi, kesadaran kritis di era kapitalisme global sangat terpengaruh oleh budaya konsumisme atau konsumerisme melalui propaganda iklan. Menurut Sindhunata (1982: 98), hal itu sebagai tanda bahwa kesadaran instrumental yang terutama terlihat dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada era kapitalisme global. Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (2008: 18-19), budaya konsumisme hedonistik global tumbuh dan berkembang, orang semakin dimanipulasi oleh promosi dan iklan sehingga orang sudah dalam paksaan psikis untuk membeli dan membeli. Mengenai hal ini, Mudji Sutrisno (2009: 104-105) memiliki empat pendapat. Pertama, banjir info eksotik iklan itu membendakan, termasuk kesadaran yang dibendakan. Jadi, proses menjadi sadar dan menyadari itu dibekukan (dihentikan). Kedua, kesadaran kritis ditumpulkan oleh fetishisme atau pemberhalaan. Misalnya, kita memberhalkan merk minyak wangi atau sepatu sehingga apabila tidak demikian, seseorang merasa ketinggalan zaman. Ketiga, berlakunya kesadaran semu sebagai hasil bentukan iklan. Kesadaran kritis tunduk pada kesadaran semu oleh hegemoni pencitraan dunia virtual, manusia sudah dikonstruksi oleh dunia iklan, dalam citra, gaya hidup bahkan selera. Selanjutnya, apabila pengetahuan hanya memberitahu dalam info lalu membuat senang dalam infotainment, tetapi melumpuhkan kesadaran kritis, maka yang terjadi adalah pendangkalan atau pembodohan.

Pemahaman mengenai pelemahan kesadaran kritis oleh iklan dapat ditelusuri lewat peran media massa, terutama televisi. Penayangan iklan yang sangat mampu menggugah nafsu konsumen untuk membeli telah memunculkan masalah, yaitu pada satu sisi media massa harus mencapai idealismenya sebagai sarana pendidikan, pada sisi lain televisi harus mengarahkan misinya atas dasar pragmatisme ekonomi (salah satunya dipenuhi dengan penayangan iklan) sehingga media massa mampu bertahan. Iklan media yang dibuat sedemikian rupa mampu mengajak pemirsa berharap, pemirsa patuh pada apa yang dikatakan oleh iklan sehingga media massa mampu menciptakan sikap konsumerisme. Konsumerisme membentuk budaya instan yang membenarkan kenikmatan. Hal ini menandakan bahwa rasionalitas instrumental telah mewarnai media massa dan pada waktu yang bersamaan hedonisme individual mengabaikan kontrol sosial dari instansi tradisional sehingga

norma-norma tradisional luntur (Haryatmoko 2007: 25-30).

MASALAH SENI TRADISI

Masalah seni tradisi yang dikemukakan oleh Mudji Sutrisno berkaitan dengan pengaruh globalisasi pada nilai-nilai budaya tradisional. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra (2007: 9) di tengah masyarakat kita terjadi disorientasi, dislokasi atau krisis sosial budaya dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat. Hal ini terekspressi dalam gaya hidup baru yang tidak selalu sesuai, positif, dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa, misalnya semakin merebaknya resto McDonald, meluasnya seni telenovela, hedonisme, dan sebagainya. Sebagai implikasinya adalah terjadinya krisis budaya nasional dan lokal lebih lanjut, identitas kultural nasional dan lokal menjadi lenyap. Padahal, identitas nasional dan lokal sangat mutlak bagi terwujudnya integrasi nasional, kultural, politik masyarakat, dan negara-bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan itu, Mudji Sutrisno (2009: 109) mengemukakan pemikirannya mengenai seni tradisi dalam kaitannya dengan seni modern dan kapitalisme global. Seni tradisi harus diletakkan sebagai seni yang didukung dan dikembangkan oleh masyarakat tradisional dengan tradisi lisan yang mengekspresikan ungkapan-ungkapan seninya baik melalui suara, gerak, maupun wacana lisan. Sementara itu, seni modern mulai dengan tradisi tulisan, media visual elektronika dan didukung oleh kapitalisme global yang menempatkan hubungan antara seni dengan komodite. Tujuan utamanya adalah laku jual. Untuk itu, kelangsungan hidup seni tradisi dalam terpaan komoditisasi dan komersialisasi global ditentukan oleh dua soko guru. Pertama, ruang kreativitas seniman sendiri yang dengan menggali tradisi ditantang untuk menangkap roh tradisi, lalu berkreasi dan mewujudkan dalam karya-karya seni entah auditif, pertunjukan, gerak, musikal, teatrical. Kecenderungan komersialisasi seni adalah membendakan dan menyempitkan gerak roh tradisi, memoles penampilan agar menarik, bukan memberi roh baru bagi tradisi. Kedua, mengembangkan dan memberi kondisi penggairahan kreasi tradisi.

Dalam konteks tersebut kiranya peran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan rasionalisasi dunia kehidupan (*Lebenswelt*),

yang menurut Jurgen Habermas (1984: 237-239), rasionalisasi di dunia Barat kurang mendapat perhatian atau terdesak oleh rasionalisasi di bidang kerja. Rasionalisasi demikian berpengaruh di Indonesia karena Indonesia sebagai negara berkembang merupakan wilayah yang menjadi sasaran sistem ekonomi kapitalis negara industri maju.

KREATIVITAS KEBUDAYAAN

Kreativitas adalah salah satu faktor penting bagi lahirnya karya seseorang. Menurut Mochtar Lubis (1993: 270), rakyat yang tidak boleh kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kurun waktu setengah abad lebih akan kehilangan kreativitas dan daya inisiatifnya. Mudji Sutrisno (2009: 119) berpendapat bahwa kreativitas kebudayaan merupakan misteri dari tetap tumbuhnya kemanusiaan ketika peradaban dihadapkan pada ujian-ujian sejarah, seperti kekejaman politik, penindasan hak asasi dan sebagainya. Akan tetapi, kreativitas itu tak akan mati karena berada dalam tataran nurani yang jernih. Misalnya, ketika ujian dan krisis mau memperlakukannya dengan kejam, peradaban humanis memiliki cara tersendiri, yaitu bertahan (bahasa budaya bisu, bahasa pasif represif) terhadap kenyataan yang sadistis. Dengan segala kerendahan hati sejarah pengalaman tersebut dapat diolah sehingga potensi-potensi budaya akan menjadi peradaban humanis melalui dua cara. *Pertama*, memberi kebebasan agar bangsa dapat menuju cita-cita para pendiri republik ini, yaitu masyarakat beradab, terbuka, majemuk, manusiawi. *Kedua*, berusaha mengolah trauma sejarah dalam rekonsiliasi kebudayaan dan penegasan untuk menolak kekerasan yang menghasilkan kebiadaban melalui sikap percaya dan hormat pada harkat sesama dalam kemajemukan suku, agama, golongan sebagai sumber pengikat bangsa dalam satu cita-cita yang sama.

Jadi, kreativitas dapat berkembang dengan wajar ketika seseorang terbebas dari sikap represif atau tekanan psikis. Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (1995: 28-29), tekanan psikis berkaitan dengan kekuasaan kita terhadap batin kita. Tekanan psikis lebih buruk dan lebih jahat dari paksaan. Tekanan psikis mengganggu kepribadian kita, membuat kita tidak berdaya.

KOTA DAN BUDAYA: RUANG PUBLIK TITIK TEMUNYA

Salah satu fenomena globalisasi yang sangat mencolok adalah penguasaan bidang ekonomi yang digerakkan oleh rasionalitas instrumental. Gerak rasionalitas instrumental itu menjajah semakin banyak bidang dari *Lebenswelt*, yaitu dimensi kehidupan nyata sehari-hari, di mana kita bergerak dan di mana nilai-nilai dan tradisi dibentuk, dihayati, berkembang, dan diteruskan (Franz Magnis-Suseno 1995: 249). Hal itu dapat dilihat dalam pergeseran fungsi ruang publik sebagaimana dikemukakan oleh Mudji Sutrisno (2009:125). Menurut Mudji Sutrisno, salah satu contoh ruang publik sebagai ruang bersama adalah alun-alun kerajaan Surakarta. Di alun-alun kerajaan publik dapat menghayati kebersamaan yang dilangsungkan dalam seni dan kebudayaan (sekatenan, perayaan pasar malam, lebaran, seni panggung), publik dapat menyampaikan protes halus dengan cara berjemur diri, dan sebelum memasuki masa pemakaian uang sebagai nilai tukar, alun-alun berperan sebagai media perekatan nilai antara kuasa raja, religi, dan masjid (setelah Islam masuk). Ruang publik seperti itu bergeser fungsi, dari fungsi budaya seperti tersebut ke fungsi ekonomis ketika perayaan kebersamaan dibingkai dengan lapangan tempat panggung pameran dagang dengan kepentingan ekonomis dan nilai ekonomis industri yang menjadikan pasar jual beli atau masuknya kepentingan kelas ekonomi. Gambaran seperti itu mencerminkan bahwa rasionalitas instrumental sudah menjadi egoisme individualistik yang dibebaskan dari keterikatan tanggung jawab sosial tradisional (Franz Magnis-Suseno 1995:250).

PENUTUP

Kesan pertama dari buku *Ranah-Ranah Kebudayaan* adalah munculnya kesulitan bagi pembaca pada umumnya untuk memahami isinya karena dua alasan. Pertama, penulis buku ini sering menuliskan satu ide dalam satu paragraf yang terdiri dari beberapa baris, misalnya tujuh baris, dan banyaknya kata-kata kiasan yang digunakan. Kedua, kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang pemikiran dalam buku ini tidak selalu dipahami oleh pembaca sehingga sistematika penulisan buku ini perlu disempurnakan.

Bagaimanapun juga, dengan semua kesulitan itu buku *Ranah-ranah Kebudayaan* mendorong pembaca untuk lebih memahami sisi negatif dari globalisasi yang sangat berpotensi mensubordinasikan nilai-nilai tradisi dalam *Lebenswelt* kita sehari-hari. Sisi negatif yang sangat memprihatinkan itu berjalan seiring dengan berkembangnya sisi positif, berupa tersedianya sarana-sarana hidup yang memberi kemudahan pada kita sehingga kita dapat terlena olehnya. Tidak mustahil bagi yang memiliki kesempatan untuk menyesuaikan dengan globalisasi secara mudah, seperti kaum pemodal/investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar (investor asing), akan bertambah egois, kurang memiliki solidaritas karena dorongan hukum yang berlaku dalam kapitalisme itu sendiri adalah mengakumulasi modal melalui pencapaian keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini diharapkan menjadi pemikiran pihak-pihak tertentu, seperti lembaga pendidikan, lembaga penelitian, institusi terkait, dan sebagainya, mengingat ulah kapitalisme global di Indonesia semakin menggurita dan siap menggulung nilai-nilai tradisi yang sudah lama dibangun dan dipelihara.

Atas dasar itu semua, hendaknya pemerintah melakukan hal-hal yang berguna bagi masa depan bangsa. Pertama, pemerintah secara terus-menerus dan konsekuen mencangkokkan materi budaya lokal sebagai wahana nilai-nilai ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi implikasi negatif rasionalisasi di dunia Barat yang sekarang kita alami. Kedua, dalam konteks yang lebih luas, pemerintah hendaknya mendanai anak-anak putus sekolah atau tidak memiliki biaya sesuai dengan pesan para pendiri Republik Indonesia dalam konstitusi kita, yaitu UUD '45 pasal 31, 34. Pelaksanaan kedua hal tersebut kiranya tidak dapat dilaksanakan secara perlahan karena globalisasi yang menjelma dalam kapitalisme global sudah semakin memengaruhi dan menguasai kehidupan.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Arief, Sritua. 1998. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Bandung: Zaman.
- Azra, Azyumardi. 2008. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

- Bahagijo, Sugeng (editor). 2006. *Globalisasi Menghempas Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Bertens, K. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Connerto, Paul (editor). 1976. *Critical Sociology*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books.
- Giddens, Anthony. 2000. *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*. (diterjemahkan oleh Ketut Arya Mahardika). Jakarta: Gramedia.
- Habermas, Jurgen. 1984. *The Theory of Communicative Action, Reason and The Rationalization of Society*. (translated by Thomas McCarthy). Boston: Beacon Press.
- Hunnex, Milton D. 1986. *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*. Michigan: Zondervans Publishing House.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lubis, Mochtar. 1993. *Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia: Himpunan "Catatan Kebudayaan" Mochtar Lubis di Majalah Horison*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Marcuse, Herbert. 1964. *One-Dimension Man*. Boston: Beacon Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 1995. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- 1995. *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- 2000. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- 2007. *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- 2008. *Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan: 79 Tahun Sesudah Sumpah Pemuda*. Yogyakarta: Kanisius.
- Popper, Karl Raymond. 1979. *Truth, Rationality, and the Growth of Scientific Knowledge*. Klostermann: Frankfurt am Main
- Rauf, Maswadi. 1998. *Menimbang Masa Depan Orde Baru*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI dan Mizan.
- Retnowati, Endang (Editor). 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- 2009. *Ideologi Orde Baru di Era Globalisasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Ricoeur, Paul. 1991. *From Text To Action: Essays in Hermeneutics II*. (diterjemahkan oleh Kathleen Blamey dan John B. Thompson). Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
- Sastrapratedja, M. (editor). 1982. *Manusia Multidimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sindhunata. 1982. *Dilema Masyarakat Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Gramedia.

- Sudarminta. 2002. *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumaryono. 1995. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- van Peursen, C.A. 1980. *Orientasi di Alam Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Verhaak, C dan Haryono Imam. 1991. *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Atas Kerja Ilmu-Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Disertasi

- Retnowati, Endang. 2006. "Kritik terhadap Wacana Politik Orde Baru, Menelusuri Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto 16 Agustus 1985-1997", Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Filsafat.

Jurnal

- Masyarakat Indonesia Jilid XXXV, No. 1, 2009. Jakarta: LIPI Press

Website

- <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/lokuman/KADIN-98-3024-01082008.pdf>
- http://www.spi.or.id/wp.content/upload/2008/01/pandangan_petani_2008.pdf
- <http://itha.wordpress.com/2007/09/12/globalisasi-dan-kebudayaan/>
- <http://techno.okezone.com/read/2010/05/24/55/335946/kaskus-angel-of-change-bagi-anak-putus-sekolah>